

PENDIDIKAN SEJARAH DAN NASIONALISME

Dyah Kumalasari
FISE Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

This article aims at reviewing how far history instruction has been able to build nationalism spirit among the learners. Diversities of Indonesian people as an objective condition, especially in terms of ethnics, religions, cultures, and languages have been very susceptible to and potential causes of disintegration of Indonesian people. History education laden with values of the national struggles for independence is considered as strategic media for rebuilding the nationalism spirit among the learners. Reinventing nationalism spirit among the learners as representatives for youth generation is very crucial for maintaining Indonesian integrity as an integrated nation.

Keywords: history education, history instruction, nationalism

A. Pendahuluan

Periode akhir abad ke-20 dan menjelang awal abad ke-21 memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Pada periode tersebut, di Indonesia telah terjadi pergeseran tata kehidupan pemerintahan dan politik dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan hasil gerakan reformasi melalui proses demokrasi. Periode ini, juga dipandang sebagai periode krisis multidimensi yang cukup memprihatinkan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial serta budaya. Pada periode ini, bangsa Indonesia tidak hanya menyaksikan perubahan yang terjadi di negarane-negara lain, termasuk Uni Soviet, akan tetapi juga mengalami sendiri perubahan besar yang terjadi di dalam negeri. Ironisnya, yang terjadi di Uni Soviet Rusia nyaris mirip dengan yang terjadi di Indonesia pada masa kini. Di tengah kemelut krisis ekonomi dan krisis politik yang berkepanjangan, bangsa In-

donesia dihadapkan pada tantangan dan ancaman disintegrasi bangsa dan negara bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan lebih dari enam puluh tahun yang lalu terasa agak goyah ketika menghadapi berbagai gejolak sosial dan politik yang muncul pada beberapa tahun terakhir ini.

Ancaman disintegrasi terasa ketika konflik dan benturan sosial pecah dengan mengambil bentuk aksi kerusuhan dan kekerasan serta secara fenomenal dibumbui dengan masalah-masalah pertentangan yang bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Aksi kerusuhan dan kekerasan bermuatan SARA tersebut telah berhasil menggoncang dan menakuti anggota masyarakat luas. Sifat merusak dan anarkhis tersebut sudah melampaui batas nilai-nilai perikemanusiaan, keagamaan, kepribadian, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Aksi kekerasan semacam itu muncul dalam bentuk

penjarahan, pembunuhan, perkosaan, penyiksaan, pembakaran, dan perusakan rumah tempat tinggal, rumah ibadah, maupun bangunan untuk kepentingan umum. Secara spasial, kerusuhan semacam itu meluas hampir ke berbagai wilayah Indonesia, seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Ambon-Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian atau Papua.

Dipandang dari skala nasional, kerusuhan itu cukup mengejutkan karena telah menggoncangkan ikatan pergaulan bangsa yang selama ini dirasakan telah terjalin dan tidak dibayangkan akan terjadi peristiwa semacam itu. Lebih mengejutkan lagi, setelah ada indikasi bahwa sementara daerah yang bermaksud ingin memisahkan diri dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipandang bukan sesuatu yang mustahil lagi, apalagi setelah Timor Timur berhasil memisahkan diri dari Indonesia. Hal itu memberikan pertanda atau peringatan bahwa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia benar-benar sedang terancam.

Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat yang majemuk. Dalam masyarakat majemuk, nuansa etnisitas mewarnai setiap konflik. Hal ini dilandasi bahwa semua komunitas etnis pada umumnya terorganisasi secara politis, dan berbagai sub-komunitas yang ada memiliki sejarah sendiri, lembaga sosial, kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek, dan kepemimpinan sendiri. Di samping itu, secara geo-politik adanya kecenderungan bahwa semua komunitas etnis memiliki basis teritorial dan homogenitas konstituen, sehingga entitas etnis sebagai bagian strategi untuk kelangsungan hidup elit politik (Rabusha & Shesle dalam Joebagio, 2004: 352).

Apakah kemajemukan yang menjadi salah satu faktor penyebab disintegrasi bangsa? Apalagi, kemajemukan sering lebih mudah dianggap menjadi sumber kerentanan dibandingkan dengan kehomoginan. Namun, kemajemukan adalah satu kenyataan yang sudah ada dan tidak mungkin diubah lagi. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa ancaman disintegrasi itu terjadi mungkin justru karena ikatan kesatuan dan persatuan kebangsaan Indonesia sendiri yang sesungguhnya memang masih lemah. Apabila demikian, dapat diartikan bahwa bangunan kebangsaan yang selama ini telah berdiri memang belum kokoh dan mantap sehingga mudah goyah sewaktu diterpa oleh angin besar atau badai. Ikatan kebangsaan yang masih lemah dan belum kokoh merupakan pertanyaan penting yang harus dijawab oleh bangsa Indonesia sendiri pada masa kini. Demikian pula, patut dipersoalkan tentang bagaimanakah landasan kebangsaan itu harus diperkokoh dan diupayakan melalui sarana yang tepat. Hal tersebut merupakan persoalan yang mendesak untuk diupayakan pemecahannya.

Pada dasarnya, persoalan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah upaya untuk memperkokoh kembali ikatan kebangsaan yang dirasakan masih lemah. Hal ini berarti berhubungan dengan pembangunan kembali ikatan kebangsaan bangsa Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang. Persoalan tersebut adalah persoalan pembangunan kembali ikatan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan ikatan kebudayaan. Dengan demikian, ikatan kebangsaan tidak dapat dipisahkan dari ikatan negara, kemasyarakatan, dan kebudayaannya karena kebangsaan pada hakikatnya merupakan hasil dari pro-

ses pembudayaan dan pendidikan yang diupayakan oleh masyarakat, bangsa serta negara melalui sarana lembaga pendidikan yang dimilikinya (Suryo, 2002:5).

Berdasarkan penjelasan di atas, ikatan nasionalisme tidak dapat dipisahkan dari ikatan negara, kemasyarakatan, dan kebudayaannya sebab kebangsaan hakikatnya merupakan hasil proses pembudayaan dan pendidikan yang diupayakan oleh masyarakat, bangsa, serta negara melalui sarana pendidikan yang dimilikinya (Suryo, 2002:6). Di sinilah letak pentingnya pendidikan sejarah sebagai satu sarana dalam menumbuhkan kembali sikap nasionalisme, karena di dalam materi pendidikan sejarah sangat kaya dengan muatan-muatan lokal seperti sejarah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan yang sarat dengan pengorbanan yang berbeda satu daerah dengan daerah lain.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Sejarah

Sistem kegiatan pendidikan adalah sistem kemasyarakatan yang kompleks, diletakkan sebagai suatu usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam rangka membangun dan mengembangkan diri (Banathy, 1992: 175). Dalam konteks yang lebih sederhana, pendidikan sejarah sebagai sub sistem dari sistem kegiatan pendidikan merupakan usaha perbandingan dalam kegiatan belajar, yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar mengajar sehingga mendorong serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri (Banathy, 1992: 176). Di dalam pendidikan sejarah, masih banyak hal yang perlu dibenahi, seperti porsi pendidikan sejarah yang

berasal dari ranah kognitif dan afektif. Kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah kiranya perlu mendapat perhatian yang signifikan supaya tidak menimbulkan rasa bosan di kalangan peserta didik dan pada gilirannya akan menimbulkan keengganan untuk mempelajari sejarah (Soedjatmoko, 1976:15). Masih diperlukan proses aktualisasi nilai-nilai sejarah dalam kehidupan yang nyata. Dengan kata lain, sejarah tidak akan berfungsi bagi proses pendidikan yang menjurus ke arah pertumbuhan dan pengembangan karakter bangsa apabila nilai-nilai sejarah tersebut belum terwujud dalam pola-pola perilaku yang nyata.

Kegagalan bidang studi agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Kewiraan dalam mewujudkan pendidikan multikultural yang dirancang untuk mendukung perkembangan keberagaman, memberi ruang gerak bidang studi sejarah, khususnya Sejarah Indonesia untuk merevitalisasi dan mereaktualisasi bidang studinya sendiri. Revitalisasi dan reaktualisasi dapat dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan multikultural dalam bidang studi sejarah, sehingga fakta dan peristiwanya tidak kering, menjadi lebih hidup, dan diminati peserta didik. Mengapa bidang studi sejarah? Bidang studi sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah formal sarat dengan fakta dan peristiwa yang saling terkait, dan dapat digunakan untuk kepentingan apa saja, baik politis, ideologis, kajian kritis maupun diingat sebagai ingatan sosial (Joebagio, 2004:356-357).

Secara umum, pendidikan sejarah bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, dan menyadarkan peserta didik untuk mengenal diri serta lingkungannya, dan memberikan per-

spektif sejarah. Sedangkan secara spesifik, tujuan pendidikan sejarah ada tiga yaitu, mengajarkan konsep, mengajarkan keterampilan intelektual, dan memberikan informasi kepada peserta didik (Gunning, 1978:179-180). Dengan demikian, pendidikan sejarah tidak hanya bertujuan untuk menghafal berbagai peristiwa sejarah. Sudah barang tentu tujuan di sini dikaitkan dengan arah baru pendidikan modern, yaitu menjadikan peserta didik mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dirinya dan menyadari keberadaannya untuk ikut serta dalam menentukan masa depan yang lebih manusiawi bersama-sama dengan orang lain. Dengan kata lain, pendidikan sejarah berupaya untuk menyadarkan peserta didik akan sejarah diri dan masyarakatnya.

Maarif (1995:1) mengatakan bahwa pendidikan sejarah yang terlalu mengedepankan aspek kognitif, tidak akan banyak pengaruhnya dalam rangka memantapkan apa yang sering disebut sebagai jati diri dan kepribadian bangsa. Lebih jauh diungkapkan pula bahwa pendidikan sejarah nasional yang antara lain bertujuan untuk mengukuhkan kepribadian bangsa dan integritas nasional sebagai bagian dari tujuan pergerakan nasional yang dirumuskan secara padat dalam Sumpah Pemuda 1928, diperlukan pemilihan strategi dan metode mengajar yang tepat. Aspek kognitif dan aspek moral perlu dianyam secara koherensi dan integratif, masing-masing saling menguatkan, tanpa mengorbankan watak ilmiahnya (Maarif, 1995:1).

2. Nasionalisme

Menurut Toynbee, "... spirit which makes people feel and act and think about a part of any given society thought it were the

whole of that society..." (Perry, [tt]). Nasionalisme dalam konteks tersebut dimaknai sebagai semangat yang dapat menumbuhkan dan membuat rakyat merasa dan bertindak serta berpikir tentang peran dan apa yang dapat diberikan kepada masyarakat sehingga kepentingan masyarakat secara keseluruhan lebih didahulukan.

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "*nation*") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>).

Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan, dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampurkan sebagian atau semua elemen tersebut.

Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Kohn, 1984: 1). Jika dilihat nasionalisme dalam taraf pembentukannya, seperti pada pergerakan nasional, lebih terikat pada unsur-unsur subjektif seperti kesadaran kelompok dan bermacam-macam fakta mental lainnya. Pada tahap ini, nasionalisme belum memasukkan unsur objektif dari kenyataan sejarah secara nyata, seperti negara, wilayah, bahasa, tradisi bersama dan lainnya. Oleh karena itu, nasionalisme dalam proses pembentukannya dianggap sebagai faktor sosio-psikologis.

Proses pengembangan kesadaran nasionalisme Indonesia dipelopori salah satunya oleh Sukarno sejak masa

mudanya, yang berkeyakinan bahwa hanya dengan ide dan jiwa nasionalismelah sekat-sekat etnik, suku, agama, budaya dan tanah kelahiran bisa ditembus untuk menggalang persatuan perjuangan melawan kolonialisme. Dalam artikel-artikelnya, banyak pidato dan diskusi masalah nasionalisme yang dengan gencar diperjuangkan oleh Sukarno. Bahkan, sekat-sekat ideologi pun oleh Sukarno berusaha dihilangkan demi perjuangan tersebut (<http://www.korwilpdp.org/6EDITORIAL071002.htm>). Dalam bukunya, Sukarno mengungkapkan bahwa pergerakan rakyat di Indonesia, walaupun mempunyai maksud yang sama, namun mempunyai tiga sifat: Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis. Sukarno berpendapat bahwa tiga haluan tersebut di dalam suatu negeri jajahan tidak perlu berseteru satu sama lain. Sebaliknya, tiga haluan tersebut seharusnya bisa bekerjasama menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk melawan kolonialisme (Sukarno, 1965:2).

Nasionalisme Indonesia tidak bisa disepadankan dengan nasionalisme Barat. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berpondasi Pancasila. Artinya, nasionalisme tersebut bersenyawa dengan keadilan sosial yang oleh Sukarno disebut *Socio-nasionalisme*. Nasionalisme yang demikian ini menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi kepada bangsa/suku bangsa lain. Maka, nasionalisme Indonesia berbeda dengan nasionalisme Barat yang bisa menjurus ke *cauvinisme* – nasionalisme sempit – yang membenci bangsa/suku bangsa lain, menganggap bangsa/suku bangsa sendirilah yang paling bagus, paling unggul dan sebagainya, sesuai dengan individualisme Barat (Sukarno, 1965:6).

Pendapat lain tentang nasionalisme Indonesia diutarakan oleh H.O.S. Tjokroaminoto, seorang tokoh penting pada masa pergerakan nasional (dapat diakses pada <http://www.rumahkiri.net/index2.php>). Tjokroaminoto berpendapat bahwa untuk membangun nasionalisme dalam arti yang luas, tidak dapat dibangun dari sesuatu yang general. Nasionalisme Indonesia harus dibangun atas dasar kesamaan, dan untuk itu diperlukan unsur pembeda guna membersihkannya dari unsur lain. Tjokro percaya hal itu adalah Islam.

Bangsa Indonesia tersusun dari aneka ragam suku bangsa. Jelas bahwa tidak hanya suku bangsa yang beraneka ragam, melainkan juga ras, agama, dan golongan sosial-ekonomi. Belum lagi, fakta bahwa penduduk Indonesia yang jumlahnya kira-kira 250 juta itu hidup tersebar di kepulauan yang paling luas di dunia. Maka, keanekaragaman adalah kondisi dasar bangsa dan negara kita. Bilamana kita hendak membicarakan nasionalisme Indonesia, maka isu keanekaragaman itu patut menjadi landasan pertama pemahaman kita. Sejarah perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah salah satu bagian konstruksi terpenting sehingga selama 60 tahun bagian ini menjadi perekat integrasi bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka nasionalisme harus dijaga, dipelihara, dan dijamin mampu menghadapi perubahan zaman (<http://www.himpsijaya.org>).

Pembahasan tentang nasionalisme erat sekali dengan patriotisme, yaitu semangat kecintaan kepada tanah air. Aktualisasi dari nasionalisme pada dasarnya merupakan refleksi dari semangat cinta tanah air. Bagaimana wujud kecintaan terhadap tanah air, ten-

tunya masing-masing bagian waktu ada tuntutan yang berbeda-beda. Ketika tanah air Indonesia masih dijajah kolonial Belanda, sebagai wujud cinta tanah air rakyat berjuang untuk membebaskan diri belenggu penjajah. Pada masa sekarang, ketika bangsa ini telah merdeka, mereka dihadapkan dengan berbagai persoalan baik ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang lain, sehingga tuntutan patriotisme dari rakyat sangat dinantikan dalam bentuk yang berbeda.

3. Pendidikan Sejarah dan Nasionalisme

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Wujud dan bentuk tanggung jawab tersebut tidak sebatas pada masalah biaya, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kebersamaan dalam membina, mengarahkan, maupun menjalin interaksi yang serasi demi kepentingan pendidikan siswa. Salah satu konsep yang ditekankan dalam tujuan pendidikan nasional adalah terbinanya jiwa atau sikap nasionalisme (kebangsaan) di kalangan generasi muda. Mencermati persoalan tersebut, sudah sewajarnya apabila perhatian dicurahkan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tersebut.

Sikap nasionalisme yang akan dituju dalam pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme, pada dasarnya telah dimiliki oleh masyarakat dan bangsa serta negara bangsa (*nation state*) yang diperoleh sehari-hari dari pendidikan di sekolah dan pengalaman pergaulan kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Konsep bangsa yang telah dimiliki masyarakat sampai saat ini pada dasarnya merupakan penerus dari konsep bangsa menurut paham nasio-

nalisme para pendiri bangsa. Visi nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan orientasinya mewujudkan kemerdekaan sehingga ciri dan jiwa nasionalisme adalah anti kolonial. Setelah bangsa Indonesia mengalami kemajuan dalam pendidikan dan intelektualitas relevan dengan proses pembangunan, visi nasionalisme menuntut perubahan paradigma dan sikap kebangsaan yang baru. Artinya, konsep nasionalisme pada masa kini perlu disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Paradigma baru tentang nasionalisme dewasa ini harus diartikan sebagai bentuk orientasi pemikiran bangsa yang memberikan wawasan dan bimbingan bangsa, untuk secara terus menerus mencapai kemajuan dan keberhasilan dalam berbagai bidang demi meraih satu prestasi dalam wujud kebanggaan dan kehormatan bangsa. Nasionalisme dapat diartikan pula sebagai suatu orientasi pemikiran yang dapat dipakai untuk mempertahankan serta menanggulangi segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi bangsa pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, sikap kebangsaan yang harus dibangun kembali pada saat ini perlu dilandasi dengan persepsi dan konsepsi nasionalisme baru dan juga pemahaman terhadap konsep ikatan bangsa itu sendiri yang berwawasan sosial, budaya, ekonomi, dan sains (Suryo, 2002:3).

Pendidikan pada dasarnya tidak lepas dari pewarisan nilai-nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat kepada generasi penerus, termasuk di dalamnya jiwa nasionalisme. Semangat nasionalisme pada saat sekarang tidak lagi terletak pada pewarisan nilai dalam formulasi struktural, melainkan kes-

darannya sebagai anak bangsa sesuai tuntutan zamannya (Haryanto, 1996:13).

Pendidikan sejarah di sekolah tidak dapat mengabaikan fungsi didaktis dari sejarah terutama untuk menopang pertumbuhan wawasan kebangsaan yang begitu fundamental bagi pembangunan negara. Proses pembelajaran sejarah sebagai proses pemahaman dan penyadaran mampu menjadi sumber inspirasi dan pangkal tumbuhnya rasa kebangsaan. Di sini, nasionalisme dapat dikembangkan di kalangan generasi muda yang tanpa idealisme dan aspirasi mengenai tanah air dan bangsanya hanya akan lari ke penghayatan hidupnya yang dangkal, materialistis, konsumtif dengan semboyan untuk semata-mata mengumpulkan mencari uang yang mudah dan cepat (Geertz, 1994). Apabila generasi muda Indonesia berjiwa seperti itu, maka pertanyaannya adalah akan jadi apa Indonesia kita selanjutnya?

Hal yang mendasar untuk mendapat perhatian adalah proses dan tahap dimiliki, diresapi, dan diamalkan suatu nilai (dalam hal ini jiwa nasionalisme) oleh seseorang tidak dapat dicapai melalui suatu proses sesaat, apalagi hanya melalui satu atau dua jam pelajaran, melainkan memerlukan suatu proses yang panjang dan terus menerus. Sebagai suatu ilustrasi dapat dicontohkan jika tujuan pendidikan sejarah hanya untuk dapat menerangkan arti peranan nilai nasionalisme, contoh tindakan nasionalistis, siswa yang cerdas dengan cepat akan dapat menjelaskan dan berkomentar tentang peranan sikap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan (nasionalisme). Generasi muda dihadapkan pada dua pilihan kepentingan bangsa atau warga pribadi, dia lebih mementingkan kepentingan

bangsa. Sebagai contoh, seorang warga negara Indonesia mendapat tawaran menjadi pimpinan perusahaan keluarga di luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi, ternyata pilihannya tetap di dalam negeri karena dilandasi oleh rasa nasionalisme yang tinggi. Dalam hal ini, nasionalisme tersebut berupa sumbangan bagi pembangunan bangsa melalui keahlian yang dimiliki.

Kiranya cukup jelas bahwa pencapaian tingkat pendidikan sikap, afektif, nilai yang demikian tidak akan dapat terlaksana dengan jalan proses belajar mengajar biasa dengan mendasarkan kurikulum tertulis, yang tidak lebih sekedar proses mentransfer informasi, pencapaian tersebut memerlukan proses pendidikan yang intensif dan terus menerus (Soedijarto, 1998:5).

Di dalam pembelajaran, guru tidak sebatas mengajar, tetapi lebih jauh lagi adalah mendidik siswa, menanamkan sikap maupun nilai kebangsaan pada siswa. Apabila memungkinkan juga menyediakan waktu khusus untuk siswa di luar jam mengajar dalam rangka mengembangkan interaksi yang lebih positif demi keberhasilan penanaman sikap dan nilai. Pengetrapan dari semua itu dapat berupa mewujudkan sikap disiplin di lingkungan sekolah secara bersama, baik unsur guru, siswa, maupun tenaga administrasi.

Sikap disiplin dalam konteks pembinaan nasionalisme dapat pula melalui kegiatan upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, pecinta alam, maupun kegiatan lainnya. Semua kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan dan penanaman nilai, dan tetap berprinsip pada tiga R, yaitu *rules*, *regulation*, dan *routine*. *Rules* dalam arti sekolah harus membuat aturan main yang harus ditaati semua pihak karena aturan tersebut akan menumbuhkan

sikap nasionalisme di kalangan siswa. Dalam hal ini tercermin pada tata tertib siswa. *Regulation*, dalam arti ada peraturan yang dibuat dan disepakati bersama yang pada akhirnya akan mengikat semua komponen sekolah. *Routine*, kegiatan pengembangan nilai dan sikap harus dilakukan secara rutin, terus-menerus, dievaluasi untuk bahan perbaikan dan kesempurnaan. Di sini, peran orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan sekali, di samping membina, mengarahkan, memadukan pendidikan nilai kebangsaan kepada putra-putrinya. Orang tua dan masyarakat dapat memberikan penilaian dan masukan. Prinsip kerja sama dan saling membantu dalam pembinaan siswa inilah yang menjadi landasan penting bagi keberhasilan pembinaan nasionalisme di kalangan pelajar. Tentu saja bukan hal yang mudah, setidaknya akan dihadapkan pada kendala tingkat kesadaran orang tua yang heterogen serta tingkat pendidikan yang tidak sama, tentu merupakan persoalan tersendiri.

C. Penutup

Pendidikan sejarah secara umum bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, dan menyadarkan peserta didik untuk mengenal diri serta lingkungannya, dan memberikan perspektif historikalitas. Secara khusus, tujuan pendidikan sejarah ada tiga, yaitu mengajarkan konsep, mengajarkan keterampilan intelektual, dan memberikan informasi kepada peserta didik. Pendidikan sejarah yang terlalu mengedepankan aspek kognitif, tidak akan banyak pengaruhnya dalam rangka memantapkan jati diri dan kepribadian bangsa.

Pendidikan sejarah nasional antara lain bertujuan untuk mengukuhkan

kembali kepribadian bangsa dan integritas nasional sebagai bagian dari tujuan pergerakan nasional yang dirumuskan secara padat dalam Sumpah Pemuda 1928. Untuk itu, diperlukan pemilihan strategi dan metode mengajar yang tepat.

Ikatan nasionalisme tidak dapat dipisahkan dari ikatan negara, kemasyarakatan, dan kebudayaannya sebab kebangsaan hakikatnya merupakan hasil proses pembudayaan dan pendidikan yang diupayakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara melalui sarana pendidikan yang dimilikinya. Di sinilah letak pentingnya pendidikan sejarah sebagai bidang pendidikan yang paling strategis dalam rangka membangun kembali jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda.

Daftar Pustaka

- Banathy, B. H. 1992. *A Systems View of Education: Concepts and Principles for Effective Practice*. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
- Geertz, C. 1994. "Politik and Culture". Terj. Fransisco Budi Hardiman. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gunning, D. 1978. *The Teaching of History*. London: Cronhelm.
- H.O.S. Tjokroaminoto: Potret Pemikiran Nasionalisme dan Agama di Indonesia. Tersedia Pada <http://www.rumahkiri.net/index2.php>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2007.

- Heryanto, A. (Ed). 1996. *Nasionalisme Refleksi Krisis Kaum Ilmuwan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jeane, B.H. 1983. *The Sociology of Education A Systematic Analysis*. New Jersey: Intence Hall Inc.
- Joebagio, H. 2004. "Merancang Sejarah yang Multikulturalis dalam Kurikulum 2004". *Cakrawala Pendidikan*. Yogyakarta: LPM UNY.
- Kohn, H. 1984. "Nationalism, Its Meaning and History". Terj. Sumantri Mertodipuro. *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga.
- Maarif, A.S. (1995). "Historiografi dan Pendidikan Sejarah". *Makalah*. Padang: FPIPS IKIP Padang.
- "Menegakkan Kembali Ideal Nasionalisme Indonesia." Tersedia pada <http://www.korwilpdip.org/6EDITORIAL071002.htm>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2007.
- "Nasionalisme Ditinjau dari Akarnya." Tersedia pada <http://www.himpsijaya.org>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2007.
- "Nasionalisme." Tersedia pada <http://id.wikipedia.org>. Diakses Pada Tanggal 10 September 2007.
- Ornstein, A. C., & Levine U. Daniel. (tt). *An Introduction to The Foundations of Education*. Boston: Houhton Mifflin Company.
- Perry, M. [tt]. *Arnold Toynbee and The Crisis of The West*. America: University Press of America.
- Soedijarto. 1998. "Pendidikan Sejarah sebagai Wahana Pendidikan Nilai dan Sikap". *Makalah*. Disampaikan dalam simposium Pendidikan Sejarah di Jakarta: September 1998.
- Soedjatmoko. 1976. "Kesadaran Sejarah dalam Pembangunan". *Prisma*, No. 7. Jakarta.
- Sukarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Suryo, D. 2002. "Pendidikan sebagai Upaya Membangun Sikap Kebangsaan Melalui Nilai-nilai Pluralitas Budaya Bangsa". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Perubahan Kurikulum Sejarah 25 Juli 2002. Surakarta: UNS.